



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan – Bantul – Yogyakarta 55198
Telepon : 0274 – 520502 Faximile : 0274 -581675
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id ; Email : ptunjogis@mahkamahagung.go.id

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN WBS (TRIWULAN II)**

BULAN APRIL - JUNI 2026

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah melakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut penanganan pengaduan.

Keterbukaan informasi publik dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dicanangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan upaya mendukung terwujudnya peradilan yang agung.

Dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah menerapkan layanan pengaduan masyarakat melalui meja layanan PTSP. Dan secara berkala pelaksanaan layanan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan layanan pengaduan masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyadari tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap aparatur dan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

B. Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut atas penanganan pengaduan masyarakat, adalah:

- sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam turut aktif membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- memberikan penilaian dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat untuk menentukan langkah-langkah yang diambil oleh Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terhadap informasi masyarakat atas dugaan pelanggaran korupsi, kolusi dan nepotisme;
- mengukur kualitas pelayanan peradilan serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap aparatur dan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan WBS (*Whistleblowing System*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui aplikasi SIWAS selama bulan April - Juni 2026 , adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Nama Pelapor	Laporan	Keterangan
1.	April			NIHIL
2.	Mei			NIHIL
3.	Juni			NIHIL

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi atas penaganan pengaduan masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta selama bulan Januari – Maret 2026 , diperoleh hasil bahwa dari semua sarana layanan yang tersedia tidak ditemukan adanya pelaporan/pengaduan yang diajukan atas pelaksanaan layanan Pengaduan dan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, sehingga tidak ada tindak lanjut yang harus dilakukan.

IV. REKOMENDASI

Dengan tidak ditemukan adanya pelaporan/pengaduan WBS mlalui aplikasi SIWAS yang diajukan selama bulan April - Juni 2026, diharapkan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dapat terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif dan meminimalisir bahkan meniadakan adanya pengaduan, yang berarti mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Yogyakarta, 1 Juli 2026

Wakil Ketua



RETNO NAWANGSIH



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Rapat Nomor 1145/PAN/UND.PW1.2/VI/2026
Hari : Rabu
Tanggal : 1 Juli 2026
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Persiapan
Acara : Monev Gratifikasi, Pengaduan, WBS, E-Lapor, Keluhan/Saran Masyarakat, Pengaduan Melalui Media, Benturan Kepentingan
Peserta Rapat :
1. Wakil Ketua PTUN Yogyakarta
2. Hawasbid Kepaniteraan Muda Hukum
3. Panitera Muda Hukum
4. Pelaksana Kepaniteraan Muda Hukum

Jalannya Rapat:

Rapat Monev Monev Gratifikasi, Pengaduan, WBS, E-Lapor, Keluhan/Saran Masyarakat, Pengaduan Melalui Media, Benturan Kepentingan dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Ibu Retno Nawangsih, S.H., M.H. pukul 11.00 WIB.

Adapun inti dari rapat tersebut yaitu :

1. Monitoring dan Evaluasi Gratifikasi

Tim melaksanakan monitoring terhadap pengendalian gratifikasi di PTUN Yogyakarta. Berdasarkan hasil monitoring, mekanisme pengendalian gratifikasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh aparat diimbau untuk tetap menjaga integritas, menolak segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, serta segera melaporkan apabila terdapat indikasi penerimaan gratifikasi melalui mekanisme yang telah ditetapkan

2. Monitoring dan Evaluasi Pengaduan

Tim melakukan monitoring terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat. Hasil monitoring menunjukkan bahwa pengelolaan pengaduan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari penerimaan, pencatatan, hingga

tindak lanjut terhadap setiap pengaduan yang masuk. Seluruh laporan telah ditangani sesuai prosedur dan terdokumentasi dengan baik.

3. Monitoring dan Evaluasi WBS

Pelaksanaan Whistleblowing System (WBS) berjalan dengan baik dan berfungsi sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran di lingkungan PTUN Yogyakarta. Selama periode monitoring tidak terdapat kendala dalam pengelolaan WBS. Petugas diharapkan tetap melakukan pemantauan secara berkala terhadap kanal pelaporan untuk memastikan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti.

4. Monitoring dan Evaluasi E-LAPOR

Tim melakukan monitoring terhadap layanan E-Lapor sebagai salah satu media penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring, layanan berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kendala dalam pengelolaan maupun tindak lanjut laporan yang diterima. Monitoring rutin tetap dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan.

5. Monitoring dan Evaluasi Keluhan/Saran Masyarakat

Monitoring terhadap keluhan dan saran masyarakat menunjukkan bahwa seluruh masukan yang diterima telah dicatat dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan. Selama periode monitoring tidak terdapat keluhan yang bersifat signifikan. Seluruh unit kerja diharapkan terus terbuka terhadap masukan dari masyarakat sebagai bagian dari perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

6. Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Melalui Media Sosial

Tim melakukan monitoring terhadap pengaduan maupun pertanyaan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial dan media komunikasi lainnya. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh pesan dan pengaduan telah direspons dengan baik oleh petugas yang berwenang. Admin media sosial diharapkan tetap aktif melakukan pemantauan serta memberikan tanggapan yang cepat, sopan, dan informatif kepada masyarakat.

7. Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan

Tim melaksanakan monitoring terhadap penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh aparatur telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip profesionalitas, independensi, dan bebas dari benturan kepentingan. Selama periode monitoring tidak ditemukan adanya indikasi maupun laporan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Seluruh pegawai diimbau untuk terus menjaga integritas serta segera melaporkan apabila terdapat potensi benturan kepentingan.

Demikian hasil Rapat Monev pada Kepaniteraan Hukum PTUN Yogyakarta yang dapat kami sampaikan. Rapat ditutup pukul 12.00 WIB oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Yogyakarta, 2 Juli 2026

Mengetahui,
Panitera

Notulis



Rizkityas Sekar Handini,S.H.



Mohammad Zahid,S.H.,M.H.

Dokumentasi Rapat:





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1144/PAN/UND.PW1.2/VI/2026
Sifat : Biasa
Hal : Monev Gratifikasi, Pengaduan, WBS
E Lapor, Keluhan/Saran Masyarakat,
Pengaduan Melalui media dan
Benturan Kepentingan

Yogyakarta, 30 Juni 2026

Yth. Para Pejabat pada daftar terlampir.
di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Mengharap kehadiran Bapak / Ibu Rapat Monev Kepaniteraan Muda Hukum
dengan jadwal sebagai berikut:

pada hari, tanggal : Rabu, 1 Juli 2026
waktu : 11.00 WIB
tempat : Ruang Sidang Persiapan
acara : Monev Monev Gratifikasi, Pengaduan, WBS, E Lapor
Keluhan/Saran Masyarakat, Pengaduan Melalui media
dan Benturan Kepentingan

Demikian atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


Mohammad Zahid

LAMPIRAN I

Surat Undangan Panitia

Nomor : 1144 /PAN/UND.PW1.2/I/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

DAFTAR PEJABAT YANG DIKIRIMI UNDANGAN

1. Wakil Ketua PTUN Yogyakarta
2. Hawasbid Kepaniteraan Muda Hukum
3. Panitia Muda Hukum
4. Pelaksana Kepaniteraan Muda Hukum
5. Notulis : Rizkytas Sekar Handini,S.H



Panitera

Mohammad Zahid



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id ptunjogja@mahkamahagung.go.id

DAFTAR HADIR

MONEV GRATIFIKASI, PENGADUAN, WBS, E- LAPOR,
KELUHAN/SARAN MASYARAKAT, PENGADUAN MELALUI MEDIA,
DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Juli 2026
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Pemeriksaan Persiapan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Petno Nawangrih	Waka	
2	Nieke Zulfahrum	Hawasbid	
3	Rizki Ananda	Hawasbid	
4	M. Ikhla	Pabiter	
5	Tor Ash rak	Parmu ttkm	
6	Andrie Wibowo.	PR.	
7	Rizkiyas Sekar H.	APP	
8	NANDA PADMA	APP	
9	RIRINA.M	ARSIPATIS	
10			

11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			